



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 188.45-109-2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 188.45-250-2024
TENTANG PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA
TAHUN 2025

WALI KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, telah ditetapkan Keputusan Wali Kota Nomor 188.45-250-2024 tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Wali Kota Tahun 2025;

b. bahwa dengan adanya penambahan usulan rancangan Peraturan Wali Kota yang diusulkan oleh perangkat daerah dalam rangka menyesuaikan kebutuhan visi dan misi daerah;

c. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum terhadap Keputusan Wali Kota Nomor 188.45-250-2024 perlu dilakukan perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 188.45-250-2024 tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Wali Kota Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Ketentuan Lampiran Keputusan Wali Kota Nomor 188.45-250-2024 tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Wali Kota Tahun 2025 ditambahkan angka 57 sampai dengan angka 94, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal lain sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Nomor 188.45-250-2024 tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Wali Kota Tahun 2025, tidak mengalami perubahan dan tetap berlaku.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 19 Mei 2025

WALI KOTA BUKITTINGGI,



MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 188.45 - 109 - 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
NOMOR 188.45-250-2024 TENTANG PERENCANAAN
PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA TAHUN
2025

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA TAHUN 2025

NO (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANA (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)
				BARU	UBAH		
57	PERWAKO	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RSUD	STRUKTUR ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN RSUD KOTA BUKITTINGGI		√	DINAS KESEHATAN/ RSUD	MEI
58	PERWAKO	PENGADAAN BARANG DAN JASA BLUD RSUD KOTA BUKITTINGGI	PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BLUD	√		DINAS KESEHATAN/ RSUD	MEI
59	PERWAKO	PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BLUD RSUD KOTA BUKITTINGGI	PEGAWAI PROFESIONAL LAINNYA BLUD RSUD KOTA BUKITTINGGI	√		DINAS KESEHATAN/ RSUD	MEI
60	PERWAKO	KOPERASI MERAH PUTIH	PEMBENTUKAN KOPERASI MERAH PUTIH	√		DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA	MEI

61	PERWAKO	STANDAR PELAYANAN MINIMAL	PERUBAHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL RSUD KOTA BUKITTINGGI		√	DINAS KESEHATAN/ RSUD	MEI
62	PERWAKO	PENINJAUAN TARIF RSUD KOTA BUKITTINGGI	PENINJAUAN TARIF RSUD BERDASARKAN PERDA 8 TAHUN 2023	√		DINAS KESEHATAN/ RSUD	MEI
63	PERWAKO	PERUBAHAN PERWAKO NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA KEPADA KEPALA DPMPTSP	PENDELEGASIAN KEWENANGAN JENIS PERIZINAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR)		√	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	MEI
64	PERWAKO	KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	KELAS JABATAN	√		BAGIAN ORGANISASI	MEI
65	PERWAKO	POLA TATA KELOLA BLUD PUSKESMAS	KELEMBAGAAN PROSEDUR KERJA PENGELOMPOKAN FUNGSI DAN SDM	√		DINAS KESEHATAN	MEI
66	PERWAKO	KERJA SAMA BLUD PUSKESMAS	KERJA SAMA OPERASIONAL DAN PEMANFAATAN BLUD	√		DINAS KESEHATAN	MEI
67	PERWAKO	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BLUD PUSKESMAS	1. PEMBINAAN TEKNIS DAN KEUANGAN 2. PENGAWASAN INTERNAL DAN EKSTERNAL	√		DINAS KESEHATAN	MEI
69	PERWAKO	SPM BLUD PUSKESMAS	STANDAR PELAYANAN MINIMAL BLUD PUSKESMAS	√		DINAS KESEHATAN	MEI

70	PERWAKO	PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD PUSKESMAS	1. PERENCANAAN 2. PELAKSANAAN 3. MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PIUTANG 4. PENGELOLAAN INVESTASI 5. PENGELOLAAN SILPA	√		DINAS KESEHATAN	JUNI
71	PERWAKO	REMUNERASI BLUD PUSKESMAS	PERHITUNGAN REMUNERASI	√		DINAS KESEHATAN	JUNI
72	PERWAKO	PENGADAAN BARANG/JASA BLUD PUSKESMAS	MEKANISME PENGADAAN BARANG/JASA BLUD PUSKESMAS	√		DINAS KESEHATAN	JUNI
73	PERWAKO	STANDAR HARGA SATUAN	PERUBAHAN LAMPIRAN STANDAR HARGA SATUAN		√	BADAN KEUANGAN	JUNI
74	PERWAKO	ANALISIS STANDAR BIAYA	PERUBAHAN ANALISIS STANDAR BIAYA		√	BADAN KEUANGAN	JUNI
75	PERWAKO	PERUBAHAN KETIGA PENJABARAN APBD 2025	PERGESERAN APBD		√	BADAN KEUANGAN	JULI
76	PERWAKO	INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2025-2030	INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2025-2030	√		BAG. ORGANISASI	SEPTEMBER
77	PERWAKO	PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024	√		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SEPTEMBER

78	PERWAKO	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	√		BAG. ORGANISASI	NOVEMBER
79	PERWAKO	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	√		BAG. ORGANISASI	NOVEMBER
80	PERWAKO	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	√		BAG. ORGANISASI	NOVEMBER
81	PERWAKO	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DAN TENAGA KERJA	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DAN TENAGA KERJA	√		BAG. ORGANISASI	NOVEMBER
82	PERWAKO	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	√		BAG. ORGANISASI	NOVEMBER
83	PERWAKO	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG	√		BAG. ORGANISASI	NOVEMBER

		RUANG DAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
84	PERWAKO	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	√		BAG. ORGANISASI	NOVEMBER
85	PERWAKO	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	√		BAG. ORGANISASI	NOVEMBER
86	PERWAKO	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	√		BAG. ORGANISASI	NOVEMBER
87	PERWAKO	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN	√		BAG. ORGANISASI	NOVEMBER
88	PERWAKO	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN	√		BAG. ORGANISASI	NOVEMBER
89	PERWAKO	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN	√		BAG. ORGANISASI	NOVEMBER

			PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH				
90	PERWAKO	PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	√		BAG. ORGANISASI	NOVEMBER
91	PERWAKO	PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	√		BAG. ORGANISASI	NOVEMBER
92	PERWAKO	PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD PADA DINAS DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD PADA DINAS DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	√		BAG. ORGANISASI	NOVEMBER
93	PERWAKO	PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK	1. PEDOMAN MANAJEMEN ASET TIK 2. PEDOMAN MANAJEMEN SDM SPBE 3. PEDOMAN MANAJEMEN LAYANAN INFORMASI SPBE 4. STANDAR DAN TATA CARA PELAKSANAAN AUDIT KEAMANAN SPBE 5. PENYELENGGAARAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK	√		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	NOVEMBER

Be

			6. INTEGRASI LAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK				
94	PERWAKO	PETA RENCANA SPBE	PETA RENCANA SPBE UNTUK JANGKA WAKTU LIMA TAHUN	√		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	NOVEMBER

WALI KOTA BUKITTINGGI,


 MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS